

DPMPTSP  
Kota Yogyakarta



# RENCANA KERJA 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA  
2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 3
1.3.1. Maksud	I - 3
1.3.2. Tujuan	I - 3
1.4. Sistematika Penulisan	I - 4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	II-31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	II - 33
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 71
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>III - 1</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	III - 3
3.3. Program dan Kegiatan	III - 4
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>IV - 1</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>V - 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022 .....	II - 6
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 .....	II - 18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 .....	II - 33
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....	II - 39
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	III - 2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta .....	III - 4
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....	IV - 7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 didasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 109)
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen



Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

##### **1.2. Landasan Umum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta**

##### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta**

##### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta**

##### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 13.643.039.329,00 (Tiga belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/92,39 persen dengan realisasi anggaran Rp 12.604.701.704,00 (Dua belas milyar enam ratus empat juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus empat rupiah) atau sebesar 92,39 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

##### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2022 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 10.741.125.418,00 telah terealisasi sebesar Rp 9.814.241.053,00 dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 91,37%. Keberhasilan program internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan internal OPD didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, dan anggaran dari APBD. Program internal tersebut terdiri dari 6 (enam) kegiatan

antara lain perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan Perangkat Daerah, administrasi umum Perangkat Daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

## **B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu nilai rencana investasi. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I. Target program pada tahun 2022 adalah Rp 361.897.752.376,00 realisasi program sebesar Rp 9.947.844.681.628,00. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.182.056.263,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.096.780.787,00 atau sebesar 92,79 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kegiatan fasilitasi pendampingan proses perizinan berusaha OSS, dilaksanakannya kegiatan sosialisasi perizinan berusaha OSS dan dilaksanakannya pemantauan perizinan berusaha OSS RBA. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah nilai rencana investasi diisikan oleh calon investor sendiri ke OSS, namun pada kenyataannya terkadang mereka mengisi tanpa perhitungan dan berbeda jauh dengan realisasi investasinya sehingga menyebabkan nilai rencana investasi tinggi dan nilai realisasinya tidak setinggi nilai rencananya. Hal tersebut disebabkan oleh karena ketidakpahaman pelaku usaha terkait tata cara pengisian rencana investasi pada OSS RBA sehingga terjadi double pengisian rencana investasi

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/intensif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 441.050.343,00 dengan realisasi sebesar Rp 431.860.463,00 atau terserap 97,92 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  - a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Penanaman Modal  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 126.519.804,00 dengan realisasi sebesar Rp 123.588.400,00 atau terserap 97,68 persen.
  - b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 314.530.539,00 dengan realisasi sebesar Rp 308.272.063,00 atau terserap 98,01 persen.
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 741.005.920,00 dengan realisasi sebesar Rp 664.920.324,00 atau terserap 89,73 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 164.799.804,00 dengan realisasi sebesar Rp 134.642.100,00 atau terserap 81,70 persen.

- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 576.206.116,00 dengan realisasi sebesar Rp 530.278.224,00 atau terserap 92,03 persen.

### **C. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur dan persentase tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I. Target program pada tahun 2022 adalah 95,00% untuk persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur dengan realisasi program sebesar 103,68 % dan capaian kinerja program sebesar 103,68%. Sedangkan Target program pada tahun 2022 untuk persentase tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan adalah 100% untuk persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur dengan realisasi program sebesar 100 % dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 792.267.040,00 dengan realisasi sebesar Rp 792.255.292,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sarana pengaduan sudah disediakan melalui surat langsung ke OPD, email, WA, kotak pengaduan maupun JSS sehingga masyarakat/pemohon dapat melakukan pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan, adanya koordinasi antara internal bidang dan petugas pengampu, tersedianya loket pelayanan konsultasi izin dan non izin, adanya tambahan personel di loket pelayanan yang membantu memfasilitasi pemohon, adanya penambahan jam layanan di loket PTSP untuk memfasilitasi jumlah pemohon yang ingin berkonsultasi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pengaduan yang masuk sering tentang OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang tau harus kemana mereka mengajukan komplain sehingga pengaduan ditujukan ke DPMPTSP, namun oleh DPMPTSP dijembatani agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 792.267.040,00 dengan realisasi sebesar Rp 792.255.292,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
  - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 495.140.420,00 dengan realisasi sebesar Rp 495.140.420,00 atau terserap 100 persen.
  - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 198.097.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 198.097.500,00 atau terserap 100 persen.

- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 99.029.120,00 dengan realisasi sebesar Rp 99.029.120,00 atau terserap 98,01 persen.

#### **D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase Jumlah Investor yang telah melaporkan LKPM. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal II. Target program pada tahun 2022 adalah 75% dengan realisasi program sebesar 99% dan capaian kinerja program sebesar 132%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 589.385.772,00 dengan realisasi sebesar Rp 563.708.740,00 atau sebesar 95,79 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya koordinasi internal dan bidang tentang pelaporan LKPM, diselenggarakannya bimbingan teknis penyampaian LKPM dan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan untuk investor. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah OSS untuk menu pelaporan LKPM UMK sedang dalam pengembangan oleh Lembaga OSS, sehingga untuk pelaku usaha UMK nilai investasi belum masuk rilis BKPM dan kurang patuhnya pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 588.485.772,00 dengan realisasi sebesar Rp 563.708.740,00 atau terserap 95,79 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 372.406.872,00 dengan realisasi sebesar Rp 353.256.840,00 atau terserap 94,86 persen.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 216.078.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 210.451.900,00 atau terserap 97,39 persen.

#### **E. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi**

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II. Target program pada tahun 2022 adalah 100% dengan realisasi program sebesar 94,12% dan capaian kinerja program sebesar 94,12%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 339.104.836,00 dengan realisasi sebesar Rp 337.715.832,00 atau sebesar 99,59 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kebutuhan akan sistem pengelolaan arsip, proses pencarian arsip perizinan yang membutuhkan waktu cukup lama dan adanya tujuan pelayanan lebih maksimal dan mempercepat kinerja. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih menunggu proses koordinasi dengan

instansi terkait , dikarenakan sistem yang belum terintegrasi menunggu tindak lanjut dari pembagian kewenangan antara provinsi dan Pemkot dan mulai tahun 2023 sesuai rekomendasi KPK untuk pengembangan sistem informasi anggaran dipindahkan ke Kominfo tetapi pelaksanaannya tetap DPMPSTSP sehingga masih menunggu koordinasi lebih lanjut terkait tugas dan kewenangan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 339.104.836,00 dengan realisasi sebesar Rp 337.715.832,00 atau terserap 99,59 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 339.104.836,00 dengan realisasi sebesar Rp 337.715.832,00 atau terserap 99,59 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program & kegiatan tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
		K	(Rp)	K	(Rp)	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	A	Rp 10.741.125.418	100%	Rp 9.814.241.053	91,37
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>43.151.232</b>	<b>100%</b>	<b>43.146.040</b>	<b>99,99</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja tahun 2023 dan Perubahan Renja tahun 2022, Review Renstra	3 Dokumen	5.721.332	100%	5.716.200	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Honorarium Tenaga Teknis	1 Orang	31.753.040	100%	31.753.040	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, hasil renstra OPD	3 Dokumen	5.676.860	100%	5.676.800	
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen				
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5.302.423.852</b>	<b>100%</b>	<b>4.487.557.667</b>	<b>84,63</b>



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	5.293.839.000	100%	4.478.973.267	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi dan Keuangan	12 Dokumen Akuntansi	3.224.928	100%	3.224.800	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	1.259.960	100%	1.259.800	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Laporan	4.099.964	100%	4.099.800	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>743.606.094</b>	<b>100%</b>	<b>740.643.306</b>	<b>99,60</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Jenis	55.553.000	100%	55.308.750	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat/Bahan Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	2 Jenis	455.054.738	100%	453.309.038	
	Alat Tulis Kantor	67 Jenis				
	Bahan Komputer	31 Jenis				
	Dekorasi Tematik Ruang MPP	7 Event				
	Peralatan Rumah Tangga Kantor	20 Jenis				

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	23 Jenis	112.298.250	100%	111.977.000	
	Penggandaan Surat-surat Dokumen	20.000 Lembar				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar Harian Lokal	12 bulan	3.240.106	100%	2.740.000	
	Surat Kabar Harian Nasional	12 bulan				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jamuan Sidang Rapat	600 Orang	117.460.000	100%	117.308.518	
	Koordinasi dan Konsultasi Dinas Dalam Daerah	0 Kali				
	Makan dan Minum Rapat	600 Orang				
	Promosi, Koordinasi dan Konsultasi (Luar Pulau Jawa)	2 Kali				
	Promosi, Koordinasi dan Konsultasi (Pulau Jawa)	5 Kali				
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>680.824.100</b>	<b>100%</b>	<b>676.845.100</b>	<b>99,41</b>
Pengadaan Mebel	Bracket Standing Monitor	4 Unit	205.777.100	100%	204.858.100	
	CCTV	2 Unit				

	LCD Proyektor	1 Buah				
	Rak Besi	4 Unit				
	Sensor Gate	2 Unit				
	TV LED	8 Unit				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	10 Unit	475.047.000	100%	471.987.000	
	Camera Zoom	1 Unit				
	Komputer	16 Unit				
	Notebook/laptop	2 Unit				
	Pompa Air	1 Unit				
	Printer	15 Unit				
	Scanner Ukuran Folio	1 Unit				
	UPS	15 Unit				
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1.021.870.610</b>	<b>100%</b>	<b>989.497.490</b>	<b>96,83</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	400 Buah	4.000.000	100%	4.000.000	
	Surat Kilat Tercatat Pengiriman Dokumen	0 Buah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	16.500.000	100%	16.260.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	1.001.370.610	100%	969.237.490	

	Jasa Petugas Pengamanan Pelayanan Umum	12 Bulan				
	Sewa Tanaman	12 Bulan				
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2.949.249.530</b>	<b>100%</b>	<b>2.876.551.450</b>	<b>97,53</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	19 Unit	279.995.000	100%	219.892.450	
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	19 Unit				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aki Genset	2 Unit	216.126.500	100%	211.805.500	
	BBM Genset	1.824 Liter				
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0 Unit				
	Pelumas Genset	5 Liter				
	Terpeliharanya AC	44 Unit				
	Terpeliharanya Alat Kantor dan Rumah Tangga	3 Jenis				
	Terpeliharanya CCTV	6 Unit				
	Terpeliharanya Genset	1 Unit				
	Terpeliharanya Mesin Ketik	2 Unit				

	Terpeliharanya PC/Laptop	14 Unit				
	Terpeliharanya Printer	20 Unit				
	Terpeliharanya Scanner	1 Unit				
	Terpeliharanya UPS	1 Kali				
	Terpeliharanya Vertical Blind	116 Meter Persegi				
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor MPP DPMPTSP	11 Jenis	2.453.128.030	100%	2.444.853.500	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Rencana Investasi</b>	<b>361.897.752.376 Rupiah</b>	<b>Rp 1.182.052.263</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.096.780.787</b>	<b>92,79</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>441.050.343</b>	<b>100%</b>	<b>431.860.463</b>	<b>97,92</b>
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Terkait Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	1 Dokumen	126.519.804	100%	123.588.400	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan Melalui Mal Pelayanan Publik	7 Kali	314.530.539	100%	308.272.063	
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>			<b>741.005.920</b>	<b>100%</b>	<b>664.920.324</b>	<b>89,73</b>

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Peluang Investasi Melalui Kemitraan Penanaman Modal	1 Dokumen	164.799.804	100%	134.642.100	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Promosi Investasi	4 Event	576.206.116	100%	530.278.224	
	Updating Database Investasi	12 Kali				
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentasi Penerbitan Izin yang Sesuai Prosedur;</b>	<b>95%;100%</b>	<b>Rp 792.267.040</b>	<b>98,30%</b>	<b>Rp 792.255.292</b>	<b>100,00</b>
	<b>Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan</b>					
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>792.267.040</b>	<b>98,30%</b>	<b>792.255.292</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berkas Izin dan Non Izin yang Terlayani	7.500 Berkas	495.140.420		495.140.072	

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dokumen Cetak Stiker Reklame	2 Jenis Cetak		198.097.500		198.089.100	
	Dokumen Pemenuhan Komitmen OSS yang Terverifikasi	4.000 Berkas					
	Permohonan Izin Melalui OSS yang Terlayani	1.500 Berkas					
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Pengaduan Perizinan yang terselesaikan	24 Pengaduan		99.029.120		99.026.120	
	Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan	2.000 Layanan					
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Jumlah Investor yang telah melaporkan LKPM</b>	<b>75%</b>	<b>Rp</b>	<b>588.485.772</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 563.708.740</b>	<b>95,79</b>
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>588.485.772</b>	<b>100%</b>	<b>563.708.740</b>	<b>95,79</b>

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	253 Perusahaan	372.406.872	100%	353.256.840	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1 Dokumen	216.078.900	100%	210.451.900	
	Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	1 Dokumen				
	Terlaksananya Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha				
	Terlaksananya Identifikasi, Penyelesaian dan Evaluasi Permasalahan dan Hambatan PM	1 Dokumen				



<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin yang Sesuai Prosedur;</b>	<b>95%;100%</b>	<b>Rp 339.104.836</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 337.715.832</b>	<b>99,59</b>
	<b>Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan</b>					
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>339.104.836</b>	<b>100%</b>	<b>337.715.832</b>	<b>99,59</b>
Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Aplikasi SIM Penanaman Modal Perizinan yang Terpelihara	12 Aplikasi	339.104.836	100%	337.715.832	
	Arsip Perizinan yang Disusutkan	15.000 Berkas				
	Arsip Perizinan yang Terkelola	23.600 Berkas				
	Fumigasi	925 M2				
	Scan Entri Dokumen Gambar pada Berkas IMB	0 Lembar				

	SIM Aplikasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Dikembangkan	2 Unit				
	Updating Sub Domain Penanaman Modal dan Perizinan	1 Sub Domain				
	Virtual Hologram	0 Unit				

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			(22)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	<b>Nilai Investasi meningkat</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoralat</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>5.447.286.418,00</b>	<b>A</b>	<b>5.447.286.418,00</b>	<b>A</b>	<b>5.371.560.008,00</b>	<b>100%</b>	<b>97,94%</b>						<b>DPMP TSP</b>	
<b>PerencanaanPenganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>43.151.232,00</b>		<b>43.151.232,00</b>		<b>43.146.040,00</b>		<b>99,99%</b>							
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		5.721.332,00	100,00%	5.721.332,00	100,00%	5.716.200,00	100,00%	99,91%							
			Dokumen Renja tahun 2023 dan Perubahan Renja tahun 2022, Review Renstra			0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		31.753.040,00	100,00%	31.753.040,00	100,00%	31.753.040,00	100,00%	100,00%							
			Honorarium Tenaga Teknis			0 orang		0 orang		1 orang	100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.676.860,00	100,00%	5.676.860,00	100,00%	5.676.800,00	100,00%	100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, pelaksanaan, hasil renstra OPD, dan kinerja perangkat daerah			0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>8.584.852,0</b>		<b>8.584.852,0</b>		<b>8.584.400,0</b>		<b>99,99%</b>							

									0		0		0		%							
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi dan Keuangan	0 dokumen akuntansi	0 dokumen akuntansi	12 dokumen akuntansi		3.224.928,00	100,00%	3.224.928,00	100,00%	3.224.800,00	100,00%	100,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		1.259.960,00	100,00%	1.259.960,00	100,00%	1.259.800,00	100,00%	99,99%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0 laporan	0 laporan	12 laporan		4.099.964,00	100,00%	4.099.964,00	100,00%	4.099.800,00	100,00%	100,00%							
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>743.606.094,00</b>		<b>743.606.094,00</b>		<b>765.433.468,00</b>		<b>102,94%</b>							
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Jenis	0 Jenis	18 Jenis		55.553.000,00	100,00%	55.553.000,00	100,00%	76.042.750,00	100,00%	136,88%							
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 Jenis	0 Jenis	67 Jenis		455.054.738,00	99,99%	455.054.738,00	99,99%	453.309.038,00	100,00%	99,62%							
				Tersedianya Alat/Bahan Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis			100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya Bahan Komputer/Printer	0 Jenis	0 Jenis	31 Jenis			100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	0 Jenis	0 Jenis	20 Jenis			100,00%		100,00%		100,00%								

			Tersedianya Dekorasi Tematik Ruang MPP		0 Event		0 Event	7 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00		0,00	112.298.250,00	100,00%	112.298.250,00	100,00%	111.977.000,00	100,00%	99,71%							
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		0 Jenis		0 Jenis	23 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%								
			Penggandaan Surat-surat Dokumen		0 Lembar		0 Lembar	20.000 Lembar	100,00%		100,00%		100,00%								
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00		0,00	3.240.106,00	100,00%	3.240.106,00	100,00%	2.640.000,00	100,00%	81,48%							
			Tersedianya Surat Kabar Harian Lokal		0 Jenis		0 Jenis	1 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%								
			Tersedianya Surat Kabar Harian Nasional		0 Jenis		0 Jenis	1 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%								
	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00	117.460.000,00	100,01%	117.460.000,00	100,01%	121.464.680,00	100,00%	103,41%							
			Tersedianya Jamuan Sidang Rapat		0 Orang		0 Orang	600 Orang	100,00%		100,00%		100,00%								
			Tersedianya Makanan Minum Rapat		0 Orang		0 Orang	600 Orang	100,00%		100,00%		100,00%								
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Jawa)		0 Kali		0 Kali	3 Kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Perjalanan Dinas Luar Pulau Jawa		0 Kali		0 Kali	2 Kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Perjalanan Dinas Promosi, Koordinasi dan Konsultasi (Pulau Jawa)		0 Kali		0 Kali	2 Kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>680.824.100,00</b>		<b>680.824.100,00</b>		<b>685.447.100,00</b>		<b>100,68%</b>							
	12	Pengadaan Mebel			0,00		0,00	205.777.100,00	99,99%	205.777.100,00	99,99%	205.505.100,00	100,00%	99,87%							
			Tersedianya LCD Proyektor		0 Buah		0 Buah	1 Buah	100,00%		100,00%		100,00%								
			Tersedianya Rak Besi		0 Unit		0 Unit	4 Unit	100,00%		100,00%		100,00%								



		Jasa Petugas Pengamanan Pelayanan Umum		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Sewa Tanaman		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>2.949.249.530,00</b>		<b>2.949.249.530,00</b>		<b>2.879.451.450,00</b>		<b>97,63%</b>						
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0,00		0,00			279.995.000,00	100,00%	279.995.000,00	100,00%	219.892.450,00	100,00%	78,53%						
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		0 Unit		0 Unit		19 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas		0 Unit		0 Unit		19 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00		0,00			216.126.500,00	100,01%	216.126.500,00	100,01%	214.705.500,00	100,00%	99,34%						
		Tersedianya BBM Genset		0 Liter		0 Liter		1.824 Liter		100,00%		100,00%		100,00%							
		Tersedianya Aki Genset		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Tersedianya Vertical Blind		0 Meter Persegi		0 Meter Persegi		116 Meter Persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
		Terpeliharanya Genset		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Terpeliharanya Pompa Air, Televisi, CCTV		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Terpeliharanya Mesin Ketik		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Terpeliharanya AC		0 Unit		0 Unit		44 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Terpeliharanya PC/Laptop		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Terpeliharanya UPS		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Terpeliharanya Printer		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100,00%		150,00%		150,00%							
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Terpeliharanya Scanner		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				0,0		0,0			2.453.128.030,00	100,00%	2.453.128.030,00	100,00%	2.444.853.500,00	100,00%	99,66%						



Nilai Investasi meningkat	PROGRAM PENGEMBANGAN IM PENANAMAN MODAL	Terpeliharanya Gedung Kantor MPP DPMPSTP	0 Jenis	0	0 Jenis	0	11 Jenis	00	100,00%	00	100,00%	00	100,00%	%	%						
					<b>Rata-rata</b>	<b>n kinerja</b>								<b>100,00%</b>	<b>99,72%</b>						
					<b>Predikt</b>	<b>kinerja</b>									<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>					
		<b>Persentase realisasi investasi</b>	<b>(Nilai realisasi investasi / Nilai rencana investasi) x 100%</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.182.056.263,00</b>		<b>1.182.056.263,00</b>		<b>1.087.573.787,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>92,79%</b>					
<b>Nilai Rencana Investasi</b>	<b>Nilai Rencana Investasi yang tertuang dalam OSS pada Tahun n</b>	<b>361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,227,706,890</b>	<b>0,00</b>	<b>361,897,752,376</b>	<b>0,00</b>	<b>361,897,752,376</b>	<b>0,00</b>	<b>9.947.844.681.628</b>	<b>0,00</b>	<b>2,76%</b>	<b>0,00%</b>						<b>Koordinator Subtansi Kelompok Penanaman Modal I</b>		
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas</b>	<b>/Insentif Dibidang</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>dalammenyangdi K</b>	<b>ewenanga Daerah</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>441.050.343,00</b>		<b>441.050.343,00</b>		<b>431.860.463,00</b>		<b>97,92%</b>								
1	Penetapan Kebijakan Daerah						126.519.804,00	100,00%	126.519.804,00	100,00%	123.588.400,00	100,00%	97,68%								
	mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Terkait Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	<b>0 DOKUMEN</b>	<b>0 DOKUMEN</b>	<b>1 DOKUMEN</b>			100,00%		100,00%		100,00%									
	2	Evaluasi Pelaksanaan					314.530.539,00	100,00%	314.530.539,00	100,00%	308.272.063,00	100,00%	98,01%								

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan		0 KALI		0 KALI		7 KALI		100,00%		100,00%		100,00%							
		Melalui Mal Pelayanan Publik																			
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>	<b>asi Kabupaten/Kota</b>	<b>a</b>							<b>741.005.920,00</b>		<b>741.005.920,00</b>		<b>655.713.324,00</b>		<b>88,49%</b>					
	3 Penyusunan Rencana Umum				0,00		0,00			164.799.804,00	100,00%	164.799.804,00	100,00%	134.642.100,00	100,00%	81,70%					
	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Peluang Investasi Melalui Kemitraan Dokumen Penanaman Modal			0 Dokumen		0 Dokumen		1		100,00%		100,00%		100,00%						
	4 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				0,00		0,00			576.206.116,00	100,00%	576.206.116,00	100,00%	521.071.224,00	100,00%	90,43%					
		Promosi Investasi			0 Even		0 Even		4 Even		100,00%		100,00%		100,00%						
		Updating Database Investasi			0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%						
							<b>Rata-rata capaian kinerja</b>								<b>100,00%</b>	<b>91,96%</b>					
							<b>Predikat kinerja</b>								<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>					
<b>Nilai Investasi meningkat</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur</b>	<b>(Jumlah penerbitan izin yang sesuai prosedur / Jumlah permohonan izin) x 100%</b>	<b>95% %</b>	<b>0,00</b>	<b>89,85% %</b>	<b>0,00</b>	<b>95% %</b>	<b>792.267.040,00</b>	<b>95% %</b>	<b>792.267.040,00</b>	<b>103,68% %</b>	<b>792.255.112,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>100,00%</b>						<b>Koordinator kelompok substansi PTSP I</b>

			<b>Persentase Tindakan lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan</b>	<b>(Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindak lanjut i / Jumlah Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang masuk) x 100%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>100% %</b>	<b>0,00</b>	<b>100% %</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>					<b>Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I</b>	
		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>								<b>792.267.040,00</b>		<b>792.267.040,00</b>		<b>792.255.112,00</b>		<b>100 %</b>						
		1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			0,00		0,00		495.140.420,00	100,00%	495.140.420,00	100,00%	495.140.072,00	100,00 %	100,00 %						
			Berkas Izin dan NonIzin yang Terlayani		0 Berkas		0 Berkas		7.500 Berkas		100,00%		100,00%		100,00 %							
		2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal			0,00		0,00		198.097.500,00	100,00%	198.097.500,00	96,29%	198.088.920,00	96,29 %	100,00 %						
			Dokumen Cetak Stiker Reklame		0 Cetak		0 Cetak		2 Cetak		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Dokumen Pemenuhan Komitmen OSS yang Terverifikasi		0 Berkas		0 Berkas		4.000 Berkas		100,00%		100,00%		100,00 %							



		Persentase realisasi kegiatan penanaman modal	Jumlah kegiatan penanaman modal yang terealisasi dilokasi dibagi jumlah kegiatan yang dikunjungi X 100%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%						
		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>588.485.772,00</b>		<b>588.485.772,00</b>		<b>563.708.740,00</b>		<b>95,79%</b>						
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			0,00		0,00	372.406.872,00	100,00%	372.406.872,00	100,00%	353.256.840,00	100,00%	94,86%						
		Tertindaklanjuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		0 Perusahaan		0 Perusahaan			100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			0,00		0,00	216.078.900,00	100,00%	216.078.900,00	100,00%	210.451.900,00	100,00%	97,40%						
		Tertindaklanjuti Analisa dan Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		0 Dokumen		0 Dokumen			100,00%		100,00%		100,00%							









Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
  - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator kinerja program dan 16 kegiatan, 30 sub kegiatan dengan 82 indikator kinerja sub kegiatan;
  - b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang memenuhi target, 3 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
  - c. Dari 82 indikator kinerja sub kegiatan, 82 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
  - a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator kinerja program dan 16 kegiatan, 30 sub kegiatan dengan 82 indikator kinerja sub kegiatan;
  - b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 1 indikator program belum dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra; dan
  - c. Dari 82 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penanaman modal;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu;
7. pengoordinasian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan teknologi informasi;
9. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan pada pelayanan terpadu satu pintu;
10. penerbitan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan sesuai kewenangan Dinas;

11. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
12. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
13. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
14. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
15. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
16. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Terlaksananya sosialisasi, konsultasi publik, pendampingan, dan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha.
3. Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan dengan para calon investor/pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM dan membuka loket khusus layanan konsultasi dan pendampingan OSS (Online Single Submission) di Mall Pelayanan Publik.
4. Terbentuknya Mall Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan administrasi publik di Kota Yogyakarta.
5. Terlaksananya kerjasama dengan instansi/lembaga/stakeholder terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di MPP.
6. Terbentuknya aplikasi SIADI (Sistem Arsip Digital) dan disediakan ruang arsip khusus di Mall Pelayanan Publik. Terbentuknya aplikasi SIMPPONI (Sistem Informasi MPP Online Terintegrasi) dan SIPADI (Sistem Panggilan Digital).
7. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dalam cek point jogja terkait cek point investasi dan sudah ada di JSS.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.
2. Peningkatan kualitas SDM dengan workshop, bimtek, dan diikuti diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan.

3. Peningkatan koordinasi dan evaluasi internal yang dinamis, sinergis, dan terpadu.
4. Pengusulan penambahan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Penanaman Modal. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
<b>Tujuan:</b>											
Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi (dalam Rupiah)	289.069.008.162	291.021.296.800	306.219.082.711	306.219.082.711	288.151.242.774	308.015.205.801	248.673.816.754	428.457.722.988	319.966.195.786	332.380.884.182
<b>Sasaran:</b>											
Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi (dalam Rupiah)	289.069.008.162	291.021.296.800	306.219.082.711	306.219.082.711	288.151.242.774	308.015.205.801	248.673.816.754	428.457.722.988	319.966.195.786	332.380.884.182

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan nilai investasi memiliki 1 indikator kinerja, yaitu nilai investasi meningkat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar Rp 428.457.722.988 dari target sebesar Rp 308.015. 205.801 dengan capaian kinerja sebesar 139,10 persen; dan
2. Sasaran nilai investasi meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu nilai investasi, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar Rp 428.457.722.988 dari target sebesar Rp 308.015. 205.801 dengan capaian kinerja sebesar 139,10 persen.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perlunya penyesuaian peraturan di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Contoh : Terdapat kekosongan jabatan fungsional karena ketidaksesuaian antara Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
2. Adanya kebijakan pelimpahan kewenangan tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan non perizinan.
3. Belum adanya SOP perizinan dan non perizinan secara komprehensif.
4. Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidaktahuan adanya kewajiban penyampaian LKPM dan ketidaktahuan tata cara penyampaian LKPM. Selain hal tersebut kewenangan untuk pelaporan LKPM ada di kantor pusat perusahaan sehingga untuk lokasi cabang di Kota Yogyakarta tidak memiliki hak akses untuk menyampaikan pelaporan hal ini yang menjadi permasalahan di daerah sehingga laporan terkendala.
5. Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidakpatuhan pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM secara berkala.
6. Penyusunan laporan atas kegiatan pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum terlaksana karena dasar hukumnya baru diundangkan pada akhir bulan Desember 2022.
7. Terlalu banyak penyusunan evaluasi penyelenggaraan kinerja DPMPSTP yang diselenggarakan oleh Kementerian maupun Lembaga terkait.
8. Belum terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perizinan dan Nonperizinan dan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
9. Belum selesainya penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan.
10. Belum adanya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
11. Masih kurang optimalnya kegiatan promosi investasi.
12. Perizinan Berusaha melalui OSS RBA masih dirasa sulit bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro.
13. Adanya perubahan kebijakan dari Kemendagri terkait hak akses data kependudukan sehingga konsep layanan kependudukan di SIMPPONI berubah.
14. Mall Pelayanan Publik tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan luas bangunan gedung.
15. Pengguna bangunan gedung masih menjadi satu dengan Perangkat Daerah lain.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan atau swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan pengembangan Sistem Informasi MPP Online Terintegrasi (SIMPPONI).
2. Penyusunan Kajian Akademik dan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
3. Penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur mengenai pengendalian pembangunan hotel.
4. Penyusunan kajian akademik yang digunakan sebagai dasar Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur mengenai pengendalian pembangunan hotel.
5. Penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan.
6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
7. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video dan pembuatan leaflet.
8. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
9. Koordinasi dan sinkronisasi DPMTSP dengan Perangkat Daerah Teknis dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ( Online Single Submission ) dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
10. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Inspeksi Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Integrasi sistem dan data antar Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Print From Home dan Mal Pelayanan Publik.
13. Adanya alih Media Arsip Fisik IMB menjadi Arsip Digital.
14. Penyesuaian terhadap SOP dan SPP dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
15. Pengembangan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan.
16. Pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan:

1. Selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder terkait.
2. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu
3. Adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik.
4. Terbentuknya Mall Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan administrasi publik di Kota Yogyakarta.
5. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat di Kota Yogyakarta.
2. Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha.
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk-produk khas Kota Yogyakarta.

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **“Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.  
Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses

belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku

pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemanjapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatkan Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 3, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reuiu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:





<i>(Nilai Akreditasi)</i>															
2.18.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.843.116,00					Pemant apan Kinerja Aparatu r dan Birokra si untuk Pelayan an Publik		54.956.841, 00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>					3.258.058,00							3.388.381,0 0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1	3.258.058,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)						
2.18.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)</i>					3.914.000,00							4.070.560,0 0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2	3.914.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA A)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)						
2.18.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	<i>Dokumen Perubahan RKA-</i>					3.379.750,00							3.514.940,0 0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			<i>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>			2	3.379.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
2.18.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		<i>Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>				33.299.750,00						34.631.740,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2	33.299.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
2.18.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		<i>Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>				3.379.750,00						3.514.940,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2	3.379.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					
2.18.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		<i>Laporan Capaian Kinerja</i>				2.575.308,00						2.678.320,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			<i>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>				2	2.575.308,00	<i>(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>						
2.18.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>					3.036.500,00	<i>(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)</i>	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>					3.157.960,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							1	3.036.500,00								

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Targ et Ak hir Per iod e Re nst ra OP D	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAH UN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OM PO K SA SA RA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TA R G E T 20 24	PAGU INDIKAT IF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.835.190.85 0,00				Pem antap an Kinerj a Apar atur dan Birok rasi untuk Pelay anan Publi k			5.028.598.48 4,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.814.255.85 0,00							5.006.826.08 4,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)</i>				3 6	4.814.255.85 0,00	(Kota Yogyakarta,	PENDAP ATAN						

									KOTA YOGYAKARTA	ASLI DAERAH (PAD)								
2.18.01.2. 02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)</i>						3.670.000,00									3.816.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								3 6	3.670.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)							
2.18.01.2. 02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)</i>						3.700.000,00									3.848.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								1 2	3.700.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)							
2.18.01.2. 02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>						2.570.000,00									2.672.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								4	2.570.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH							

		<i>Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>						TA)	H (PAD)						
2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)</i>					1.505.000,00							1.565.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1	1.505.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>					5.770.000,00							6.000.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1	5.770.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)						
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan						3.720.000,00							3.868.800,00	Dinas Penanaman

	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)</i>												Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1 2	3.720.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						22.325.750,00			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			23.218.780,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>					5.283.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)				5.494.840,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						3	5.283.500,00							
2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						5.344.750,00						5.558.540,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



		<i>Dokumen Pengaman Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>							(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)						Terpadu Satu Pintu	
						1 2	5.344.750,00										
2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						2.886.000,00								3.001.440,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Rencana OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)</i>				2	2.886.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)						

2.18.01.2. 03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>					3.069.750,00							3.192.540,00	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					1 2	3.069.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKAR TA)	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)							
2.18.01.2. 03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>				2.865.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKAR TA)	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)						2.980.380,00	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					2	2.865.750,00									
2.18.01.2. 03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Dokumen Hasil Pemanfaata n Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>				2.876.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKAR TA)	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)						2.991.040,00	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					2	2.876.000,00									

2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						18.204.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		18.932.420,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>					18.204.250,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18.932.420,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1 2	18.204.250,00							
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						977.042.292,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan		1.016.123.983,68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



		<i>Alat/Bahan Kegiatan Kantor Bahan Komputer (Paket)</i>			2 7	186.352.500, 00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		<i>Alat/Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover (Paket)</i>			5	45.724.500,0 0	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		<i>Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya (Paket)</i>			2	11.299.000,0 0	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		<i>Alat/Bahan Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas (Paket)</i>			2	3.200.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		<i>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Paket)</i>			3	38.150.000,0 0	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		<i>Dekorasi Tematik Ruang MPP (Paket)</i>			7	70.000.000,0 0	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		<i>Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Printer (Paket)</i>			1 0	4.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Tar get Ak hir Per iod e Re nst ra OP D	REA LISA SI CAP AIAN RENJ A OPD TAH UN 2022	PRAK IRAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TA R G E T 20 24	PAGU INDIKATI F(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS		TAR GET	PAGU INDIKATI F(Rp)		
											NASI ONAL					DAE RAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						108.636.700, 00							112.982.168, 00	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Alat/Bahan Kegiatan Kantor Perabot Kantor (Paket)</i>					1 9	92.636.700,0 0	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKAR TA)	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)						
		<i>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Paket)</i>					8	16.000.000,0 0	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKAR TA)	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)						

2.18.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)</i>					135.453.250, 00						140.871.380, 00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						2 3	135.453.250, 00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
2.18.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<i>Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Dokumen)</i>					3.240.106,00						3.369.710,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1	3.240.106,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
2.18.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Buah)</i>					295.669.000, 00						307.495.760, 00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						3 1 9	7.337.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH					

							TA)	H (PAD)						
		Makanan dan Minuman Rapat (Orang)				1.800	30.932.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		Perjalanan Dinas Dalam Negeri Biasa (Kali)				7	257.400.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						767.429.620,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		798.126.804,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						366.229.620,00						380.878.804,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Mebel yang Tersedia (Unit)				10	366.229.620,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					



						2										
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						401.200.000,00								417.248.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Unit)				1 2	180.800.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
		Belanja Modal Personal Computer (Unit)				1 1	213.600.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
		Belanja Modal Pompa (Unit)				1	6.800.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.162.904.159,00						Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan		1.209.420.325,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



			<i>n Kantor (Laporan)</i>				1 2	422.717.613, 00	YOGYAKARTA	DAERAH (PAD)						
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Re nstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum (Laporan)</i>				1 2	608.686.546, 00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
			<i>Laporan Penyediaan Sewa Tanaman (Laporan)</i>				1 2	99.000.000,0 0	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	2.18.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.318.510.28 5,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			1.371.250.69 6,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



	Lapangan												Satu Pintu
		Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)			1	2.100.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Unit)			1	5.400.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					210.566.500,00						218.989.160,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Genset (Unit)			1	42.816.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		Jasa Tenaga Kebersihan Dry Clean Vertical Blind (Unit)			1	34.800.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)			1 2 9	117.950.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					





NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Targ et Ak hir Per iod e Re nstr a OP D	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAH UN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TA R G ET 20 24	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU IN DI K A T I F (R p)	
											NASI ONAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Penyusunan naskah akademik peraturan daerah terkait perizinan berusaha dan non berusaha (Dokumen)</i>				3	607.872.250, 00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKAR TA)	PENDAPA TAN ASLI DAERA H (PAD)						
	2.18.02.2. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						703.168.000, 00				Penin gkata n Perek onomi an dan Kesej ahtera an Masya rakat			731.294.720, 00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



	2.18.02.2. 02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					703.168.000, 00						731.294.720, 00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>			5	703.168.000, 00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKAR TA)	PENDAPA TAN ASLI DAERA H (PAD)					
3.	2.18.04	<b>PROGRA M PELAYAN AN PENANA MAN MODAL</b>					783.292.000, 00						814.623.680, 00	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur (%)</i>			8 6								
			<i>Persentase tindakan konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)</i>			9 5								

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						783.292.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		814.623.680,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)</i>					563.584.000,00						586.127.360,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1.200	563.584.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Orang yang</i>					117.638.000,00						122.343.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Rencana OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						600.504.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			624.524.080,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku						72.622.000,00							75.526.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

	Usahadalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	<i>Terlaksananya Identifikasi, Penyelesaian dan Evaluasi Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)</i>													Terpadu Satu Pintu		
						2 2	72.622.000,0 0	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)									
									PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal								
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)</i>					330.288.000,00								343.499.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						2 5 3	330.288.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)									
									PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal								
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	<i>Terlaksananya Analisa dan</i>					197.594.000,00								205.497.760,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

			Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha; Terlaksananya Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan Usaha; Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha. (Kegiatan Usaha)			40	197.594.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasili tasi Penanama n Modal					
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATADAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					213.597.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		222.141.660,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase ketepatan dalam proses			80								

			<b>pemenuhan permohonan data (%)</b>											
			<b>Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi (%)</b>			<b>75</b>								
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						213.597.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		222.141.660,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						213.597.750,00						222.141.660,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,</i>			1	213.597.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

			<i>Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)</i>													
	<b>J U M L A H</b>						<b>12.062.884.3 22,00</b>							<b>12.545.399.6 14,48</b>		



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijabarkan berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, dengan fokus:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah "Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu urusan penanaman modal, memiliki kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana

Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatkan nilai investasi” dengan indikator tujuan “Nilai investasi” dan tujuan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dengan indikator tujuan “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yaitu “Nilai investasi meningkat” dengan indikator sasaran “Nilai investasi” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dengan indikator sasaran “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi	319.966.195.786	332.380.884.182	345.277.262.488	358.674.020.27
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	81,75 poin	82,25 poin	82,75 poin	83,25 poin

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 12,062,884,322 (dua belas milyar enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan DAK Non Fisik. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.520.628.334

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, yang terdiri dari 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 52.843.116

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 3.258.058
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 3.914.000
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.379.750

- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 33.299.750
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 3.379.750
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 2.575.308
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 3.036.500
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.835.190.850
- Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.814.255.850
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 3.670.000
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.700.000
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.570.000
  - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 1.505.000
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 5.770.000
  - 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 3.720.000
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 22.325.750
- Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 5.283.500
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 5.344.750
  - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 2.886.000
  - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 3.069.750
  - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 2.865.750

- 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 2.876.000
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan 4) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 18.204.250  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 18.204.250
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 977.042.292  
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.814.255.850
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 383.599.236
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 108.636.700
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 135.453.250
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 3.240.106
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 295.669.000
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 6) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 767.429.620  
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Mebel (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 366.229.620
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 401.200.000
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.162.904.159  
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 16.000.000
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 16.500.000

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 1.130.404.159
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.318.510.285  
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 245.253.000
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 7.500.000
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 210.566.500
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 855.190.785
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.311.040.250  
Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 607.872.250  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    - 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 607.872.250
  - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Kegiatan 2)  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 703.068.000  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    - 1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 703.068.000
3. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 783.292.000  
Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:



- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 783.292.000

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 563.584.000
- 2) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 117.638.000
- 3) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 102.070.000

#### 4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 783.292.000

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 783.292.000

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1) Rp 72.622.000
- 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 330.288.000
- 3) Pengawasan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 197.594.000

#### 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 213.597.750

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 213.597.750

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1) Rp 213.597.750

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatkan nilai investasi dengan sasaran “Nilai investasi meningkat” dengan indikator sasaran “Nilai investasi” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dengan indikator sasaran “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat” .;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

#### **Program dan Kegiatan**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki 5 (lima) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 12,062,884,322 (dua belas milyar enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.520.628.334

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, yang terdiri dari 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 52.843.116  
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 3.258.058
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 3.914.000
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.379.750
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 33.299.750
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 3.379.750
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 2.575.308
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 3.036.500
  
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.835.190.850  
Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.814.255.850
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 3.670.000
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.700.000
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.570.000
  - 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 1.505.000
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 5.770.000
  - 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 3.720.000

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 22.325.750  
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 5.283.500
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 5.344.750
  - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 2.886.000
  - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 3.069.750
  - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 2.865.750
  - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 2.876.000
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan 4) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 18.204.250  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 18.204.250
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 977.042.292  
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.814.255.850
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 383.599.236
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 108.636.700
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 135.453.250
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 3.240.106
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 295.669.000
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 6) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 767.429.620

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 366.229.620
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 401.200.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.162.904.159

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 16.000.000
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 16.500.000
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 1.130.404.159

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.318.510.285

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 245.253.000
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 7.500.000
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 210.566.500
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 855.190.785

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.311.040.250

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 607.872.250

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 607.872.250

- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Kegiatan 2)  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 703.068.000  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    - 1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 703.068.000
3. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 783.292.000  
Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 783.292.000  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    - 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 563.584.000
    - 2) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 117.638.000
    - 3) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 102.070.000
4. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 783.292.000  
Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 783.292.000  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    - 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1) Rp 72.622.000
    - 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 330.288.000
    - 3) Pengawasan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 197.594.000

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 213.597.750

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 213.597.750

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1) Rp 213.597.750

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerintah Kota Yogyakarta  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Targ et Akhir Perio de Rens tra OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARG ET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12,062,884,322.00							12,545,399,614.48	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						12,062,884,322.00							12,545,399,614.48	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai Akreditasi)</i>					9,154,450,322.00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9,520,628,334.48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





				0.00	0.00	2.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2.00	3.514.940,00	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2	33.299.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	34.631.740,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	34.631.740,00	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2	3.379.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2	3.514.940,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		0.00	0.00	2.00	2.575.308,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2.00	2.678.320,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)</i>												
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	0.00	0.00	1.00	3.036.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1.00	3.157.960,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)</i>			51	4.835.190.850,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	51	5.028.598.484,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	0.00	0.00	36	4.814.255.850,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				36	5.006.826.084,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3.670.000,00						3.816.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	



2.18.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.770.000,00						6.000.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				12	6.000.800,00	
2.18.01.2.02 .0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.720.000,00						3.868.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)</i>		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				12	3.868.800,00	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						22.325.750,00						23.218.780,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai (Dokumen)</i>				33		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				33		
2.18.01.2.03 .0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.283.500,00						5.494.840,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

				0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3	5.494.840,00	
2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						5.344.750,00							5.558.540,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	12.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12.00	5.558.540,00	
2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						2.886.000,00							3.001.440,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2	3.001.440,00	
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.069.750,00							3.192.540,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12	3.192.540,00	
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.865.750,00							2.980.380,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan







2.18.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					135.453.250,00							140.871.380,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	0.00	0.00	23		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					23	140.871.380,00	
2.18.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.240.106,00							3.369.710,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	3.369.710,24	
2.18.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					295.669.000,00							307.495.760,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	0.00	0.00	10		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					10	307.495.760,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					767.429.620,00							798.126.804,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)</i>			174		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					174		

2.18.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel						366.229.620, 00							380.878.804, 80	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)</i>		0.00	0.00	102		(Kota Yogyakarta , KOTA YOGYAKA RTA)				102	380.878.804, 80		
2.18.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						401.200.000, 00							417.248.000, 00	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>		0.00	0.00	24.00		(Kota Yogyakarta , KOTA YOGYAKA RTA)				24.00	417.248.000, 00		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.162.904.15 9,00							1.209.420.32 5,00	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)</i>				4		(Kota Yogyakarta , KOTA YOGYAKA RTA)				4			
2.18.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.000.000,0 0							16.640.000,0 0	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta , KOTA YOGYAKA RTA)				2	16.640.000,0 0		

2.18.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.500.000,0 0						17.160.000,0 0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				12	17.160.000,0 0	
2.18.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.130.404.15 9,00						1.175.620.32 5,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>		0.00	0.00	12.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				12.00	1.175.620.32 5,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.318.510.28 5,00						1.371.250.69 6,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)</i>				124		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				124		
2.18.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						245.253.000, 00						255.063.120, 00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

				0.00	0.00	20		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				20	255.063.120,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		0.00	0.00	1.00	7.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1.00	7.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0.00	0.00	133	210.566.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				133	218.989.160,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0.00	0.00	12	855.190.785,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				12	889.398.416,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						1,311,040,250.00					Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1,363,481,860.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah Investor Baru (Investor)</i>				237										
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						607.872.250,00					Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		3	632.187.140,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi (Dokumen)</i>				3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)								
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			0.00	0.00		607.872.250,00							3	632.187.140,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)</i>				3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)								
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						703.168.000,00					Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		10	731.294.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah terlaksananya media promosi investasi (Jenis)</i>				10		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)								



		dilayani (Layanan)						YOGYAKA RTA)							
2.18.04.2.01 .0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0.00	0.00	1000	563.584.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKA RTA)			1000	586.127.360,00	586.127.360,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.2.01 .0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0.00	0.00	3000.00	117.638.000,00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKA RTA)			3000.00	122.343.520,00	122.343.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.2.01 .0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					102.070.000,00						106.152.800,00	106.152.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	0.00	0.00	100		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				100	106.152.800,00	
4.	2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM (%)</b>				600,504,000.00				<b>Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat</b>		624,524,080.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM (Investor)				600.504.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)			Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	234	624.524.080,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					72.622.000,00						75.526.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya (Kegiatan Usaha.)</i>	22.00	22.00	22.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				22.00	75.526.800,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						330.288.000,00						343.499.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)</i>	253	253	253		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				264	343.499.520,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						197.594.000,00						205.497.760,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)</i>	40	40	40		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				40	205.497.760,00	

5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					213,597,750.00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		222,141,660.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data (%)</i>			80								
			<i>Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi (%)</i>			75								
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					213.597.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		222.141.660,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah tersedianya layanan yang dikelola (Layanan)</i>			10		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				10		
			<i>Jumlah tersedianya arsip yang dikelola (Arsip)</i>			400		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				400		
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			0.00	0.00	213.597.750,00						222.141.660,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan</i>			1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1	222.141.660,00	

			Dimanfaatkan (Dokumen)															
	<b>J U M L A H</b>							<b>12.062.884.3</b> <b>22,00</b>									<b>12.545.399.6</b> <b>14,48</b>	

Sumber: [https://sipd.go.id/sipd/09e59f74723b3be4ad016126ac65736db6aee2bb/report/?file=rpt\\_renja\\_skpd\\_ranwal.fr3&report\\_type=PDF&TH=2024&KODEPEMDA=3471&KODESKPD=2.18.0.00.0.00.01.0000](https://sipd.go.id/sipd/09e59f74723b3be4ad016126ac65736db6aee2bb/report/?file=rpt_renja_skpd_ranwal.fr3&report_type=PDF&TH=2024&KODEPEMDA=3471&KODESKPD=2.18.0.00.0.00.01.0000)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan rewi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran

dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 27 Maret 2023  
Kepala Dinas



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.  
NIP. 197209141993031004